

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI POLA PADAT KARYA TUNAI DESA DARI DANA DESA DI DESA CIPAKAT KECAMATAN SINGAPARNA KABUPATEN TASIKMALAYA

Dandan Haryono¹, Evi Silviana²

Universitas Tadulako, Indonesia¹

STISIP Tasikmalaya, Indonesia²

E-mail: dandanharyono@gmail.com

ABSTRAK

Desa Cipakat, Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya, telah teridentifikasi memiliki dua masalah utama, yaitu ketidaktepatan sasaran dan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat tentang program ini. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji efektivitas Pemberdayaan Masyarakat melalui Pola Padat Karya Tunai Desa (PKTD) yang didanai melalui Dana Desa di Desa Cipakat, Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya. Metode yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian dan analisis menunjukkan bahwa dimensi Seleksi Lokasi belum dilaksanakan dengan baik, dimensi Sosialisasi juga belum dilaksanakan dengan baik, dimensi proses pemberdayaan sudah dilaksanakan dengan baik, dan dimensi pemandirian Masyarakat sudah dilaksanakan dengan baik. Kesimpulannya adalah tahapan pemberdayaan menunjukkan bahwa hanya dua dari empat tahap pemberdayaan yang telah dilakukan dengan baik, yaitu proses pemberdayaan dan pemberdayaan masyarakat untuk mandiri. Sementara itu, dua tahap pemberdayaan lainnya, yakni tahap pemilihan lokasi dan sosialisasi, masih belum terlaksana dengan baik. Maka masih dikatakan belum efektif.

Kata Kunci: *Pemberdayaan, Masyarakat, Padat Karya Tunai.*

ABSTRACT

Cipakat Village, Singaparna Subdistrict, Tasikmalaya District, two main issues have been identified: target inaccuracy and insufficient community awareness regarding this program. The aim of this research is to assess the effectiveness of Community Empowerment through the Cash for Work Program (PKTD) funded by the Village Fund in Cipakat Village, Singaparna Subdistrict, Tasikmalaya District. The research methodology employed is descriptive research with a qualitative approach. Data collection methods include interviews, observations, and document analysis. The research findings and analysis indicate that the Location Selection dimension has not been implemented effectively, and the dimension of Socialization has also been poorly executed. However, the

Empowerment Process dimension has been executed effectively, as well as the dimension of Community Empowerment towards self-sufficiency. In conclusion, the stages of empowerment show that only two out of the four empowerment stages have been executed effectively, namely the empowerment process and community self-sufficiency. Meanwhile, the other two empowerment stages, namely location selection and socialization, have not been executed effectively. Therefore, it can be deemed as ineffective.

Keywords: *Empowerment, Community, Cash For Work.*

PENDAHULUAN

Dana Desa didirikan dengan menggunakan prinsip bangunan partisipatif, yaitu mengutamakan penduduk Desa sebagai subjek pembangunan. Oleh karena itu, rencana penggunaan Dana Desa harus dibahas dan disusun dalam Musyawarah Desa serta Fokus penggunaan Dana Desa adalah untuk mencapai tujuan tersebut seperti halnya tujuan yang tertuang dalam proyek pembangunan Desa, antara lain meningkatkan taraf hidup manusia, membina kohesi masyarakat, dan menjaga lingkungan. Banyaknya penolakan terhadap penggunaan yang berasal Dana Desa dalam pembangunan infrastruktur dapat menghambat pencapaian tujuan Desa. Karena hal ini pada tahun 2019, fokus Dana Desa adalah pada peningkatan produktivitas perekonomian, peningkatan kualitas layanan dasar seperti pencegahan stunting dan perawatan anak, serta pelaksanaan program baru seperti kampanye ikan tuna untuk menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat yang masih ada di garis kemiskinan.

Desa Cipakat, Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya, adalah salah satu contoh Desa yang menerima Dana Desa untuk pembangunan. Pelaksanaan proyek-proyek ini diatur oleh Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 64 Tahun 2020. Peraturan ini menegaskan bahwa penggunaan Dana Desa harus mengutamakan penanganan dampak ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat melalui Pola Padat Karya Tunai Desa (PKTD). PKTD merupakan inisiatif pemberdayaan masyarakat di desa yang difokuskan pada produktivitas, dengan mengandalkan sumber daya tenaga kerja dan teknologi yang tersedia di tingkat lokal. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan mengurangi tingkat kemiskinan, dengan harapan meningkatkan kesejahteraan mereka.

Berdasarkan pengamatan penulis di Desa Cipakat Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya masih ditemukan permasalahan antara lain :

1. Kurang tepatnya sasaran pemberdayaan masyarakat melalui Pola Padat Karya Tunai Desa (PKTD).

2. Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat tentang kegiatan yang dilaksanakan melalui Pola Padat Karya Tunai Desa (PKTD).

Teori yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pemberdayaan. "Pemberdayaan merupakan sebagai proses penyuluhan pembangunan" (Mardikanto dan Soebianto, 2017 : 100). Untuk menganalisis Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pola Padat Karya Tunai Desa (PKTD) Dari Dana Desa di Desa Cipakat Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya dilaksanakan berdasarkan tahap-tahap pemberdayaan, yaitu tahap seleksi lokasi, sosialisasi, proses pemberdayaan dan Pemandirian masyarakat (Mardikanto & Soebianto, 2017:125)

Penelitian sebelumnya, yang telah dijalankan oleh Tiara Rama Dian pada tahun 2019 dengan judul "Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Padat Karya Tunai (Studi Kasus Desa Plandaan Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung)," menjadi landasan dan referensi bagi penelitian ini. Penelitian sebelumnya sangat penting sebagai bahan perbandingan dengan penelitian yang sedang dilakukan oleh penulis. Dalam penelitian tersebut, Tiara Rama Dian menggunakan teori Tahap Pemberdayaan (Adi, 2013: 179) sebagai dasar teoritisnya dan mengadopsi metode penelitian kualitatif.

Hasil penelitian Tiara Rama Dian menunjukkan bahwa program

Pemberdayaan Masyarakat melalui Padat Karya Tunai di Desa Plandaan telah dijalankan dengan memperhatikan tahap-tahap pemberdayaan. Namun, dalam penelitian tersebut, masih ada beberapa tahap pemberdayaan yang belum berjalan dengan optimal.

Penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh penulis memiliki relevansi dengan penelitian yang sedang dilakukan dengan judul yang sama, yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat. Walaupun topiknya serupa, perbedaan utamanya mencakup teori yang digunakan, tempat penelitian, dan periode waktu penelitian yang berbeda. Dalam penelitian yang sedang dilakukan, penulis mengadopsi metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif..

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis memiliki Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pemberdayaan masyarakat melalui pola Padat Karya Tunai Desa (PKTD) dari Dana Desa di Desa Cipakat Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya.

KAJIAN PUSTAKA

Secara konseptual, pemberdayaan, seperti yang dijelaskan oleh Ariyanto (2005:2), mengacu pada konsep pemberian atau peningkatan kekuasaan kepada kelompok masyarakat yang memiliki keterbatasan atau kelemahan. Pemberdayaan (*empowerment*) berasal dari kata "*power*" yang merujuk pada kekuasaan atau kemampuan untuk mengontrol

situasi dan kehidupan mereka sendiri. Dalam konteks ini, pemberdayaan berarti memberikan atau meningkatkan kemampuan dan Menurut Jim Ife (dalam Zubaedi, 2007:98), pemberdayaan dapat diartikan sebagai memberikan kepada individu atau kelompok sumber daya, peluang, pengetahuan, dan keterampilan yang diperlukan untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam mengendalikan masa depan mereka sendiri serta berperan serta dalam kehidupan dan perkembangan komunitas mereka. Ini berarti pemberdayaan bertujuan memberikan alat dan kapasitas kepada individu atau kelompok untuk mengambil peran aktif dalam pembentukan masa depan mereka dan memberikan dampak positif pada kehidupan komunitas.

Sementara menurut Kartasasmita (dalam Ramadhani, dkk, 2015:202), pemberdayaan adalah usaha untuk membangun potensi, dengan merangsang, memberikan motivasi, dan menggugah kesadaran akan potensi yang dimiliki, serta berupaya untuk mengembangkannya. Ini menekankan pentingnya mengidentifikasi, memotivasi, dan mengembangkan kemampuan dan potensi yang ada dalam individu atau kelompok agar mereka dapat mencapai kemandirian yang lebih besar.

Jadi, secara keseluruhan, pemberdayaan adalah upaya untuk memberikan sumber daya, dukungan, dan motivasi kepada individu atau kelompok agar mereka dapat

mengambil kendali atas hidup mereka, berpartisipasi dalam masyarakat, dan mengembangkan potensi mereka dengan lebih baik. Selanjutnya Menurut Soetomo (2015:16), dalam proses pemberdayaan masyarakat, terdapat tiga unsur utama yang terlibat, yaitu:

1. Pemberian Kewenangan

Masyarakat, terutama yang berada pada tingkat yang lebih rendah, diberikan kewenangan dalam pengambilan keputusan. Ini mencakup mengidentifikasi masalah, merencanakan solusi, terlibat dalam pelaksanaan proyek, melakukan evaluasi, dan menikmati manfaat dari pembangunan tersebut.

2. Pengembangan Kapasitas Masyarakat

Proses ini berfokus pada peningkatan kapasitas masyarakat, sehingga mereka memiliki tingkat kemandirian yang lebih tinggi dan tidak tergantung sepenuhnya pada pihak lain. Hal ini dapat mencakup pelatihan, pendidikan, dan pemberian alat-alat yang diperlukan untuk memungkinkan masyarakat mengembangkan potensi mereka sendiri.

3. Pembentukan Institusi Lokal

Institusi lokal digunakan sebagai wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi mereka dan mengambil keputusan. Institusi ini memungkinkan berbagai aspirasi dari masyarakat masuk dan diintegrasikan dalam proses pengambilan keputusan. Selain itu,

institusi ini juga dapat menjadi sarana untuk menyampaikan aspirasi kepada pihak berkepentingan seperti pemerintah atau organisasi non-pemerintah.

Jadi, dalam konteks pemberdayaan masyarakat, penting untuk memberikan kewenangan kepada masyarakat, mengembangkan kapasitas mereka, dan membentuk institusi lokal yang mendukung partisipasi dan pengambilan keputusan yang demokratis.

Dengan demikian Pemberdayaan adalah sebuah proses yang bertujuan untuk memperkuat eksistensi dan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Sumodiningrat (2007:32) pemberdayaan memiliki berbagai tujuan, antara lain sebagai berikut:

1. Untuk memberikan individu keberdayaan, ini berarti memberikan kemampuan kepada individu untuk merawat kesehatan fisik dan mentalnya, mendapatkan pendidikan yang memadai, membangun kekuatan fisik dan mental, serta memiliki nilai-nilai intrinsik yang menjadi sumber keberdayaan.
2. Agar individu dapat tetap eksis dalam konteks yang dinamis, berkembang, dan meningkatkan martabat manusia.
3. Proses ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian manusia.

Selanjutnya Pemberdayaan dianggap sebagai suatu proses dalam penyuluhan pembangunan, seperti yang

dijelaskan oleh Mardikanto dan Soebianto (2017: 100). Untuk menganalisis penelitian ini mengacu pada tahap-tahap pemberdayaan yang telah didefinisikan sebelumnya. Tahap-tahap tersebut meliputi :

- a. seleksi lokasi
- b. sosialisasi
- c. proses pemberdayaan
- d. pemberdayaan mandiri,

Sebagaimana disebutkan dalam penelitian sebelumnya (Mardikanto & Soebianto, 2017:125). Dalam konteks "Pemberdayaan Masyarakat melalui Pola Padat Karya Tunai Desa dari Dana Desa di Desa Cipakat, Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya", mari kita hubungkan konsep-konsep yang telah Anda sebutkan:

Seleksi Lokasi

Pada tahap awal pelaksanaan program Pemberdayaan Masyarakat melalui Pola Padat Karya Tunai Desa, seleksi lokasi sangat penting. Lokasi yang dipilih harus memenuhi kriteria yang sesuai untuk program ini, seperti tingkat pengangguran yang tinggi atau potensi pembangunan infrastruktur lokal yang dibutuhkan. Lokasi yang tepat akan memastikan bahwa dana desa digunakan secara efektif untuk mencapai tujuan pemberdayaan.

Sosialisasi

Sosialisasi adalah langkah penting dalam memperkenalkan program kepada masyarakat di Desa Cipakat. Ini melibatkan penyampaian informasi tentang tujuan, manfaat, dan cara program ini akan berjalan. Sosialisasi yang efektif akan membantu

meningkatkan pemahaman dan dukungan masyarakat terhadap program ini, sehingga masyarakat akan lebih terlibat dan berpartisipasi dalam Pola Padat Karya Tunai Desa.

Proses Pemberdayaan

Proses pemberdayaan dalam konteks ini mencakup berbagai tahapan di mana masyarakat di Desa Cipakat secara bertahap terlibat dalam program Pola Padat Karya Tunai Desa. Ini bisa termasuk pelatihan, pembentukan kelompok kerja, perencanaan proyek, dan pelaksanaan pekerjaan padat karya. Selama proses ini, masyarakat belajar keterampilan baru, memahami konsep kerja sama, dan mulai mengambil kontrol atas proyek yang mereka lakukan.

Pemberdayaan Mandiri

Tujuan akhir dari program ini adalah mencapai pemberdayaan mandiri masyarakat di Desa Cipakat. Ini berarti bahwa masyarakat telah mengembangkan keterampilan, pengetahuan, dan sumber daya yang cukup untuk mengelola proyek-proyek padat karya secara independen tanpa bantuan eksternal yang berkelanjutan. Pemberdayaan mandiri adalah indikator keberhasilan dalam membangun kapasitas masyarakat dan memungkinkan mereka untuk meningkatkan kualitas hidup mereka.

Jadi, keseluruhan program Pemberdayaan Masyarakat melalui Pola Padat Karya Tunai Desa di Desa Cipakat, Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya akan melibatkan langkah-langkah seleksi

lokasi yang cermat, sosialisasi yang efektif untuk mendapatkan dukungan masyarakat, proses pemberdayaan yang berkelanjutan, dan akhirnya mencapai tingkat pemberdayaan mandiri di mana masyarakat dapat mengambil alih proyek-proyek padat karya tersebut tanpa ketergantungan eksternal.

METODE

Dalam studi ini, metode penelitian yang diterapkan adalah metode deskriptif. Tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang unit sosial tertentu, yang bisa berupa individu, kelompok, lembaga, atau masyarakat secara keseluruhan (Moleong, 2011: 6).

Jenis penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah studi kasus. Studi kasus adalah pendekatan yang memberikan fokus dan perhatian yang mendalam pada suatu kasus tertentu, dengan analisis yang teliti dan rinci terhadap objek tersebut.

Dalam hal pendekatan penelitian, penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif. Metode kualitatif digunakan untuk menghasilkan data dalam bentuk deskripsi verbal atau lisan dari individu atau perilaku yang dapat diamati (Moleong, 2011: 4).

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif model interaktif, yang terdiri dari empat tahap utama: pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi (Miles dan Huberman, 2000: 120).

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan, yang melibatkan pengkajian literatur dan sumber-sumber terkait dengan masalah penelitian. Selain itu, studi lapangan juga dilakukan dengan menggunakan instrumen penelitian seperti observasi, wawancara, studi dokumentasi, dan uji keabsahan data.

Penentuan informan dalam penelitian ini dilakukan melalui teknik purposive sampling, di mana sampel dipilih berdasarkan karakteristik tertentu yang dianggap relevan dengan populasi yang telah diketahui sebelumnya (Ruslan, 2004: 156). Informan dalam penelitian ini terdiri dari lima orang.

Pelaksanaan penelitian berlangsung selama periode enam bulan. Lokasi penelitian berfokus di Desa Cipakat, Kecamatan Singarpana, Kabupaten Tasikmalaya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dana Desa yang dialokasikan untuk Desa Cipakat, Kecamatan Singarpana, Kabupaten Tasikmalaya difokuskan pada dua aspek utama, yaitu pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan penduduk desa, memperbaiki kualitas hidup mereka, dan mengatasi masalah kemiskinan. Rencana ini dicerminkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa Cipakat.

Agar Program Padat Karya Tunai dapat berjalan dengan efektif,

pembangunan di desa diarahkan untuk beberapa bidang, termasuk infrastruktur pedesaan dan kegiatan yang mendukung keberhasilan program, meskipun tidak secara langsung terkait dengan pembangunan fisik bangunan.

Tabel 1. Program Padat Karya Tunai Desa Cipakat selama tahun 2020

| No | Nama Kegiatan | Thn | Lokasi | Ket |
|----|-------------------------------|------|--------------------------|---------|
| 1 | Pembangunan Sumur | 2020 | Kp. Gandok. | Selesai |
| 2 | Pembangunan Pagar Pengaman | 2020 | Kp. Salebu | Selesai |
| 3 | Pembangunan Jalan Rabat Beton | 2020 | Kp. Cipeundeuy/Gn. Jati. | Selesai |
| 4 | Pembangunan Jalan Rabat Beton | 2020 | Kp. Jinten. | Selesai |

Sumber: Desa Cipakat Tahun 2022

Dari informasi yang berikan tentang proyek-proyek pembangunan, terlihat bahwa ada empat proyek yang dilaksanakan pada tahun 2020 di berbagai lokasi (Kp. Gandok, Kp. Salebu, Kp. Cipeundeuy/Gn. Jati, dan Kp. Jinten). Semua proyek tersebut telah selesai. Berikut adalah beberapa aspek analisis yang dapat diperhatikan:

1. Jenis Proyek

Proyek-proyek ini mencakup berbagai jenis, termasuk pembangunan sumur, pagar pengaman, dan jalan rabat beton. Ini

menunjukkan diversifikasi upaya pembangunan di berbagai area.

2. Tahun Pelaksanaan

Semua proyek dilaksanakan pada tahun 2020. Ini menunjukkan bahwa ada rencana dan alokasi anggaran untuk pembangunan di wilayah tersebut pada tahun tersebut.

3. Lokasi

Proyek-proyek ini tersebar di beberapa lokasi berbeda, seperti Kp. Gandok, Kp. Salebu, Kp. Cipeundeuy/Gn. Jati, dan Kp. Jinten. Ini menunjukkan upaya untuk mencakup berbagai wilayah dalam usaha pembangunan.

4. Status Selesai

5. Semua proyek tersebut telah selesai. Ini merupakan pencapaian yang positif, karena menunjukkan bahwa rencana pembangunan telah berhasil dilaksanakan.

6. Pentingnya Infrastruktur

Proyek-proyek seperti pembangunan sumur dan jalan rabat beton adalah jenis infrastruktur yang penting untuk kesejahteraan dan kemajuan suatu wilayah. Pembangunan pagar pengaman juga dapat meningkatkan keamanan lingkungan.

7. Pemantauan dan Evaluasi

Penting untuk melanjutkan pemantauan dan evaluasi proyek-proyek ini setelah selesai untuk memastikan bahwa mereka terus berfungsi dengan baik dan memberikan manfaat yang diharapkan kepada masyarakat setempat.

8. Partisipasi Masyarakat

Dalam proyek-proyek pembangunan seperti ini, partisipasi dan masukan dari masyarakat setempat mungkin penting untuk memastikan bahwa proyek memenuhi kebutuhan dan harapan mereka.

9. Alokasi Anggaran

Perlu dipertimbangkan juga alokasi anggaran untuk proyek-proyek ini. Apakah ada cukup sumber daya yang dialokasikan untuk menyelesaikan proyek-proyek ini dengan baik?

Selain itu, analisis lebih lanjut dilakukan dengan mempertimbangkan dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan dari proyek-proyek ini serta melihat apakah proyek-proyek ini telah memberikan manfaat yang signifikan kepada masyarakat setempat sesuai dengan tujuan awal pembangunan.

Meskipun program ini sesuai dengan rencana pemerintah, kenyataannya masih menuai kontroversi di kalangan masyarakat. Salah satu masalah yang dihadapi adalah ketidaktepatan sasaran dalam upaya pemberdayaan masyarakat melalui Pola Padat Karya Tunai Desa (PKTD). Ini tercermin dari fakta bahwa beberapa kelompok penduduk miskin belum terlibat dalam pekerjaan PKTD, seperti pembangunan jalan rabat beton di Kp. Jinten RT. 04 RW. 11 dan pembangunan jalan rabat beton di Kp. Cipeundeuy RT. 04 RW. 11.

Dalam hal ini, diperlukan pemilihan lokasi yang lebih cermat dan selektif untuk memastikan bahwa Program Padat Karya Tunai Desa dapat

dijalankan dengan efektif dan sasaran yang tepat sesuai dengan target yang telah ditentukan. Analisis pemberdayaan masyarakat dalam konteks Pola Padat Karya Tunai Desa perlu mengikuti tahapan yang telah ditentukan, termasuk seleksi lokasi, sosialisasi, proses pemberdayaan, dan pemberdayaan masyarakat. (Mardikanto & Soebianto, 2017)

Seleksi Lokasi

Seleksi lokasi adalah tahapan yang krusial dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat, dan penentuan lokasi harus mengikuti Pentingnya mencapai hasil yang diharapkan dalam upaya pemberdayaan masyarakat menekankan pentingnya mengikuti kriteria yang telah disetujui oleh lembaga terkait dan masyarakat. (Mardikanto dan Soebianto (2017:125).

Berdasarkan penelitian penulis dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti bersama dengan informan, hasilnya menunjukkan bahwa dalam penentuan lokasi, walaupun sudah mengikuti ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 64 tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pembagian, dan Penetapan Rincian Dana Desa Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2020, namun tidak melibatkan proses musyawarah mufakat dengan semua pihak terkait dalam Program Padat Karya Tunai Desa (PKTD). Kondisi ini disebabkan oleh ketidakhadiran sebagian pihak dalam rapat, sehingga tidak semua elemen PKTD terlibat dalam proses

pengambilan keputusan terkait penentuan lokasi.

Selain itu, ada masalah lain yang muncul, yaitu beberapa orang yang tidak memenuhi kriteria PKTD, seperti pekerja yang seharusnya menjadi prioritas Untuk individu yang termasuk dalam keluarga yang memiliki tingkat pendapatan rendah, yang mengalami pengangguran, atau hanya dapat bekerja sebagian waktu, serta bagi anggota masyarakat yang berada dalam situasi marginal, tetapi mereka tetap dilibatkan dalam pekerjaan PKTD. Hal ini merupakan temuan yang diungkapkan oleh Jafar, B., Haryono, D., Asrifai, A., & Roe, H. (2022).

Dalam analisisnya, situasi ini menunjukkan adanya potensi ketidakakuratan dalam proses penentuan lokasi dan seleksi sasaran program PKTD. Keterlibatan semua pihak terkait dan memastikan bahwa kriteria yang telah ditetapkan diikuti dengan ketat adalah langkah-langkah penting untuk memastikan efektivitas program pemberdayaan masyarakat melalui PKTD.

Sosialisasi

Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat mengenai kegiatan yang dilaksanakan melalui Pola Padat Karya Tunai Desa (PKTD) seperti pembangunan pagar pengaman, pembersihan saluran air di Kp. Salebu RT. 01 RW. 07, dan pembuatan Sumur BOR di Kp. Gandok, merupakan salah satu permasalahan yang menyebabkan ketidaktercapaian tujuan Program PKTD di Desa Cipakat.

Kondisi ini telah menciptakan kesalahpahaman di kalangan masyarakat, di mana sebagian dari mereka menganggap bahwa pembangunan ini dilakukan oleh pihak ketiga, padahal sebenarnya melalui PKTD. Kurangnya upaya sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Desa telah mempengaruhi persepsi masyarakat dan mengurangi dukungan terhadap program tersebut.

Untuk mengatasi permasalahan ini, kerjasama dari berbagai pihak sangat penting dalam upaya mensosialisasikan dan menjalankan Program PKTD di Desa Cipakat dengan sukses. Sosialisasi yang efektif akan membantu mengubah persepsi masyarakat dan memastikan pemahaman yang benar tentang pelaksanaan program ini.

Analisis ini menunjukkan bahwa komunikasi yang baik antara pemerintah desa, masyarakat, dan pihak terkait lainnya merupakan faktor kunci dalam kesuksesan program pemberdayaan seperti PKTD. Keterlibatan semua pihak dalam upaya sosialisasi dapat membantu memastikan kesadaran dan dukungan yang lebih besar terhadap program tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan peneliti kepada informan, tidak adanya sosialisasi dikarenakan situasi dan kondisi yang terjadi saat ini masih pandemi covid-19 jadi tidak ada acara sosialisasi apapun di tingkat desa, hal tersebut sesuai anjuran pemerintah untuk tidak mengadakan acara yang

dapat menimbulkan kerumunan. Seharusnya sosialisasi tetap bisa dilaksanakan dengan cara yang lebih efektif melalui media teknologi dan jejaring sosial yang dapat sampai kepada masyarakat tanpa berkerumun secara langsung. Hal tersebut sejalan dengan yang di sampaikan oleh Nuraisyah, N., Mangngasing, N., Nasrullah, N., & Haryono, D. (2022)

Proses Pemberdayaan

Inti dari pemberdayaan masyarakat adalah untuk meningkatkan kapasitas dan kemandirian masyarakat dalam usaha untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. (Mardikanto dan Soebianto, 2017:125).

Berdasarkan pengamatan dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti, proses pemberdayaan telah dijalankan dengan baik. Ini terlihat dari langkah-langkah yang telah dilakukan, seperti identifikasi dan kajian potensi wilayah PKTD yang diputuskan melalui musyawarah antara Pemerintah Desa dan perwakilan masyarakat. Kelompok kerja PKTD dibentuk sesuai dengan rencana pembangunan infrastruktur yang dibiayai oleh dana desa, dan kelompok-kelompok ini tersebar di berbagai kedusunan. Mereka menjalankan tugas-tugas PKTD sesuai dengan instruksi yang diberikan oleh pemerintah desa.

Selama pelaksanaan PKTD, proses dan hasilnya selalu dipantau, dan kinerja mereka dibandingkan dengan standar pekerjaan. Kontrol terhadap pekerjaan juga dilakukan oleh pihak pemerintahan desa. Ini

mencerminkan upaya untuk memastikan bahwa pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil pengamatan ini, dapat disimpulkan bahwa proses pemberdayaan yang dilakukan oleh tim fasilitator dan pemerintah desa telah berjalan dengan baik. Ini adalah indikasi positif bahwa pemberdayaan masyarakat di Desa Cipakat telah dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsipnya, dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam meningkatkan taraf hidup mereka. Dalam analisis, langkah-langkah yang telah diambil dalam pelaksanaan PKTD merupakan bagian integral dari proses pemberdayaan masyarakat yang berhasil. Pada waktu melaksanakan PKTD ada dari pihak pemerintahan desa yang mengontrol pekerjaan seperti yang disampaikan oleh Nuraisyah, N., & Haryono, D. (2022). peneliti dapat disimpulkan bahwa proses pemberdayaan yang dilakukan tim fasilitator dan pemerintah desa telah dilaksanakan dengan baik.

Pemandirian Masyarakat

Arah kemandirian masyarakat dalam konteks pemberdayaan adalah untuk mempersiapkan dan Prinsip pokok dari pemberdayaan masyarakat adalah mendukung masyarakat agar mereka memiliki kemampuan yang cukup untuk mengelola inisiatif mereka sendiri dan mencapai tingkat kemandirian yang lebih tinggi, yang pada gilirannya akan meningkatkan

kualitas hidup mereka. (Mardikanto dan Soebianto, 2017:125).

Dalam pengamatan yang telah dilakukan oleh peneliti, proses pemberdayaan masyarakat telah dilakukan dengan baik. Ini terlihat dari praktik pendampingan yang dilakukan oleh tim fasilitator dan pemerintah desa. Mereka hadir dan mendampingi masyarakat sepanjang proses pelaksanaan pekerjaan PKDT, mulai dari awal hingga akhir. Selain itu, mereka juga secara rutin melakukan evaluasi terhadap kegiatan yang sedang berlangsung.

Namun, yang lebih penting adalah bahwa pendampingan ini tidak hanya berhenti pada proses pelaksanaan dan evaluasi semata. Tim fasilitator dan pemerintah desa juga memberikan motivasi kepada masyarakat untuk dapat mandiri dalam berbagai aspek pekerjaan. Ini mencerminkan komitmen untuk tidak hanya memberikan bantuan fisik dalam pelaksanaan program, tetapi juga membangun kapasitas masyarakat sehingga mereka dapat mengelola kegiatan tersebut secara mandiri di masa mendatang.

Dalam analisis, pendampingan yang komprehensif ini mencerminkan pendekatan yang sesuai dengan prinsip pemberdayaan masyarakat. Hal ini membantu memastikan masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat sementara, tetapi juga menjadi agen perubahan yang dapat mengelola dan meningkatkan kehidupan mereka sendiri. Pendampingan yang

berkelanjutan dan upaya untuk mendorong kemandirian adalah elemen penting dalam keberhasilan pemberdayaan masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dari penelitian dan pembahasan, penulis menyimpulkan bahwa berdasarkan hasil penelitian Pemberdayaan yang dianalisis berdasarkan tahap-tahap pemberdayaan belum dilaksanakan secara keseluruhan, dari empat tahap pemberdayaan yang dilaksanakan, dua tahap pemberdayaan telah dilaksanakan dengan baik yaitu proses pemberdayaan dan pemandirian masyarakat, sedangkan dua tahap pemberdayaan yaitu tahap pemberdayaan seleksi lokasi dan sosialisasi belum dilaksanakan dengan baik. Bisa kita lihat hasil kesimpulan perdimensi di bawah ini :

1. Seleksi Lokasi

Dimensi seleksi lokasi belum dilaksanakan secara baik. Hal ini di kemukakan dilihat dari belum dilaksanakannya Padat Karya Tunai Desa melalui musyawarah yang melibatkan seluruh unsur yang terlibat seperti pekerja PKTD dan masih adanya sasaran PKTD yang tidak sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

2. Sosialisasi

Dimensi sosialisasi dapat disimpulkan belum dilaksanakan dengan sepenuhnya artinya belum baik. Hal ini dilihat dari belum dilaksanakannya sosialisasi prioritas

penggunaan dana desa dan belum adanya sosialisasi Pola Padat Karya Tunai Desa.

3. Proses pemberdayaan

Dimensi proses pemberdayaan dilaksanakan dengan cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari sudah dilaksanakannya identifikasi wilayah dan kajian potensi wilayah, adanya pembentukan kelompok kerja Padat Karya Tunai Desa dan adanya pemantauan proses dan hasil Padat Karya Tunai Desa.

4. Pemandirian Masyarakat

Dimensi pemandirian telah dilakukan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari telah adanya pendampingan oleh tim fasilitator dan pendampingan dari Pemerintah Desa Cipakat terhadap sasaran Padat Karya Tunai Desa.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ariyanto. 2005. *Ekonomi Pariwisata*. Jakarta: Rineka Cipta
- Adi, Isbandi Rukminto. 2003. *Pemberdayaan, Pengembangan Masyarakat dan Intervensi Komunitas (Pengantar Pada Pemikiran dan Pendekatan Praktis)*. Jakarta : Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Jafar, B., Haryono, D., Asrifai, A., & Roe, H. (2022, August). Effectiveness of Complaint Services at the Talise Health Center Regional Technical Implementation Unit.

- In Proceedings of the 6th Batusangkar International Conference, BIC 2021, 11-12 October, 2021, Batusangkar-West Sumatra, Indonesia.
- Mardikanto, Totok & Sobieanto, Poerwoko. 2017. *Pemberdayaan Masyarakat: Dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung : Penerbit Alfabeta
- Nuraisyah, N., & Haryono, D. (2022). *Capacity Building Kelembagaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Di Kabupaten Sigi*. JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia), 8(4).
- Miles, Mattew B dan Huberman, Michael A. 2000. *Analisa Data Kualitatif*. Jakarta : University Indonesia- PRESS
- Moleong, Lexy. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Edisi Revisi*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Nuraisyah, N., Mangngasing, N., Nasrullah, N., & Haryono, D. (2022). *Sosialisasi Penguatan Sistem Administrasi Di Desa Kanuna Kecamatan Kinovaro Kabupaten Sigi*. *Publikasi Ilmiah Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat (SIKEMAS)*, 1(3), 101-106.
- Ruslan. 2004 *metodologi Penelitian Kualitatif*. Cetakan ke-1. Yogyakarta: Ar-ruzz Media
- Ramadhani, dkk. 2015. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Disfungsional Audit*. Universitas Negeri Semarang: *Accounting Analysis Journal*
- Soetomo. 2015. *Pemberdayaan Masyarakat: Mungkinkah Muncul Antitesisnya?*. Yogyakarta: *Pustaka Pelajar*
- Sumodiningrat, G. 2007. *Pemberdayaan Sosial: Kajian Ringkas Tentang Pembangunan Manusia Indonesia*. Jakarta: *Buku Kompas*
- Tiara Rama Dian (2019) *Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Padat Karya Tunai (Studi Kasus Desa Plandaan Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung*
- Zubaedi. 2007. *Pendidikan Berbasis Masyarakat*. Yogyakarta: *Pustaka Pelajar*
- Jurnal Penelitian**
- Tiara Rama Dian. 2019. *Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Padat Karya Tunai (Studi Kasus Desa Plandaan Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung)*. Universitas Negeri Surabaya
- Peraturan**
- Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tasikmalaya No. 36 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020